

ABSTRAK

Rizkyannor. 190102030286. *Legalitas Pembuatan Buku Nikah Diluar Prosedur Pemerintah Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia (Studi Kasus Masyarakat Dayak Meratus Di Desa Malinau Kecamatan Loksado)*. Skripsi, Pembimbing: (I) H. Bahran, S.H, M.H. dan (II) Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc, MA. Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2023.

Kata Kunci: Buku nikah, Lembaga Adat, Dayak Meratus

Penelitian ini dilatarbelakangi dari adanya pembuatan buku nikah yang dilakukan oleh lembaga adat setempat. Lembaga dalam hal ini adalah sebuah wadah penerapan Undang-undang untuk melaksanakan pencatatan pernikahan dengan kondisi pasangan sesama pemeluk agama yang dianut termasuk Kaharingan yang dianut oleh masyarakat adat Dayak Meratus. Namun dalam hal ini lembaga adat membuat buku nikah sendiri, meski tertulis dalam Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Serta selanjutnya mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian empiris, dengan pendekatan sosiologi hukum. Sumber data yang digunakan terdapat data primer dan data sekunder, dengan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Data yang dicari mengenai pembuatan buku nikah oleh lembaga adat Dayak Meratus di Desa Malinau.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa buku nikah yang dikeluarkan oleh lembaga adat tidak bisa diterima sebagai persyaratan administrasi untuk pencatatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dimana kondisi hukum pembuatan buku nikah oleh lembaga adat ini menjadi alasan khusus yang menyebabkan tidak diterimanya sebagai dokumen administrasi. Di samping itu fasilitas, pelayanan dan keadaan di lapangan pun masih belum mendukung secara optimal.